

Ringkasan Kemitraan Forum Riset dan Bisnis #1

“Pengembangan Ekonomi, Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat”

Kantor KSI, 22 November 2017

Tentang Forum Riset dan Bisnis

CCPHI bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) sebuah program yang merupakan kemitraan pemerintah Australia dan Indonesia untuk sektor pengetahuan, menyelenggarakan Forum Riset dan Bisnis (FRB). Forum ini diselenggarakan sebagai perwujudan misi mendorong pertumbuhan sektor swasta di Indonesia agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan perkembangan usaha kecil dan menengah, melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, khususnya melalui kualitas riset kebijakan dan pembiayaan riset.

Sasaran (*goal*) yang ditetapkan melalui kegiatan Forum ini adalah berkurangnya gap yang terjadi di antara lembaga riset kebijakan (*Policy Research Institute* yang disingkat PRI) dengan sektor swasta, agar kedua belah pihak bisa bekerja sama dengan saling menguntungkan yaitu lembaga riset kebijakan menghasilkan riset berkualitas yang menguntungkan bisnis sektor swasta, dan sektor swasta meningkatkan kontribusi pada pendanaan riset.

Tujuan dari Forum Riset dan Bisnis adalah:

1. Memahami sektor ilmu pengetahuan, menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yg PRI bisa tawarkan ke sektor swasta: Apa kekuatan yang dimiliki seperti *network*, *social capital* dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan oleh sektor swasta? Apa faktor-faktor yang dimiliki lembaga riset yang bisa mendukung sektor swasta untuk bisa bekerja sama?
2. Membangun kepercayaan (*trust building*) di antara sektor swasta dengan sektor pengetahuan. Perusahaan swasta perlu terbuka tentang apa kebutuhannya terhadap pengetahuan dan riset kepada PRI, sebaliknya PRI juga mengungkapkan secara terbuka tentang kebijakan lembaganya dalam bekerja sama dengan pihak swasta.

Di masa depan diharapkan perusahaan swasta bisa berkoneksi erat secara langsung dengan ilmu pengetahuan (melalui lembaga riset). Dan lembaga riset juga menempatkan perusahaan swasta sebagai mitra kunci (*key partner*) dengan kerja sama saling menguntungkan, sehingga lembaga riset tidak hanya bergantung pendanaan pada pemerintah dan lembaga donor, melainkan juga bisa bekerja sama saling menguntungkan dengan pihak swasta.

Mekanisme kegiatan Forum Riset dan Bisnis ini adalah dengan mempertemukan para nara sumber yang berasal dari lembaga riset kebijakan (PRI) sesuai tema forum yang ditetapkan, dengan para peserta yang terdiri dari sektor swasta yang terdiri dari perusahaan swasta, filantropi maupun pihak swasta lainnya. Kegiatan yang dilakukan adalah berbagi informasi (*information sharing*), baik dalam pengalaman kerja sama lembaga riset dengan pihak swasta (dan sebaliknya), ekspektasi masing-masing pihak dalam bekerja sama, serta tawaran-tawaran yang diberikan oleh masing-masing pihak untuk membuat kerja sama saling menguntungkan (*mutual benefit*).

Berbagi Informasi (*Information sharing*)

SMERU Research Institute

SMERU dibentuk saat masa krisis ekonomi 1998, ketika pemerintah dan negara-negara donor yang tergabung dalam CGI (*Consultative Groups on Indonesia*) merasa tidak memiliki informasi di *grass root* level terhadap dampak dari krisis ekonomi yang

terjadi. Pemerintah dan CGI sepakat kemudian membentuk *unit monitoring* yang dikelola oleh Bank Dunia yang pada akhirnya menjadi SMERU (*Social Monitoring and Early Response Unit*). Salah satu hasil kerja SMERU selama dua tahun dalam menganalisis dampak krisis ekonomi adalah program JPS (Jaring Pengaman Sosial). Bappenas mewakili pemerintah, Bank Dunia mewakili lembaga donor, dan SMERU sebagai pelaksana sekaligus melakukan monitoring. Setelah selesai krisis pada tahun 2000, unit ini dibubarkan oleh Bank Dunia, dan kemudian membentuk lembaga independen yaitu Yayasan SMERU, atau dikenal dengan nama The SMERU Research Institute.

SMERU sangat dekat dengan donor dan pemerintah. Isu utama adalah isu sosial dan ekonomi sesuai dengan latar belakang sejarah, kemudian sekarang memperluas pada isu pendidikan dan ketenagakerjaan. Sudah lebih dari 200 studi yang dilakukan sejak 2001, dan hampir semuanya polanya sama, yaitu dibentuk dengan lembaga donor dan hasilnya adalah untuk pemerintah.

Di antara 200 kerja sama itu terdapat 3 kerja sama SMERU dengan pihak swasta, yaitu:

1. Kerja sama dengan Allianz - perusahaan asuransi multinasional.
Allianz berhasil mengembangkan *micro insurance* di Amerika Latin, dan akan dikembangkan di Indonesia. Polanya adalah Allianz bekerja sama dengan salah satu NGO swasta dan mengembangkan micro setting yang sudah berjalan yaitu Tabungan Masa Depan Sejahtera (Tamadera). SMERU berposisi sebagai think tank yang mendesain studi apakah jika program ini dijalankan di Indonesia akan berhasil atau tidak (*grand design*). Rencana akan dikerjakan di Jakarta dan Pontianak, tetapi hanya berhasil di Jakarta. Baseline berhasil dilaksanakan, tapi hasil dari baseline memperlihatkan bahwa demand untuk *micro insurance* di Indonesia itu masih sangat kecil dari kacamata bisnis/tidak terlalu potensial (per tahun 2010). Sehingga program ini kemudian dihentikan.
2. Membantu CSR Bank Danamon melalui Danamon Peduli.
Bank Danamon datang ke SMERU dengan tujuan ingin mengetahui apa yang dapat dibantu kepada masyarakat (kesejahteraan masyarakat). Mereka memiliki daerah binaan program di daerah Marunda, Jakarta. SMERU menawarkan Bank Danamon untuk mengadopsi *Property and Economic Policy* (PEP), untuk diproduksi di Marunda, dan bisa diterapkan di masyarakat. Di dalam PEP terdapat CBMS (*Community Based Monitoring System*) yang merupakan pemantauan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. PEP adalah suatu jaringan global hasil inisiatif pemerintah Kanada, di mana SMERU tergabung di dalamnya.

Sistem CBMS ini diperkenalkan SMERU di Marunda, agar masyarakat menerapkannya. Hasil dari sistem ini misalnya dapat diketahui berapa banyak anak yang *drop out*, berapa banyak bayi yang tidak diimunisasi, dsb. Dari sini dapat disusun program yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Di akhir kerja sama (tahun 2011), SMERU mentransfer sistem ini kepada Bank Danamon karena sistem ini akan mereka terapkan di tempat-tempat lain. Karena membutuhkan sistem analitis data yang agak canggih, sistem ini cenderung dianggap agak berat meski sebetulnya cukup sederhana.
3. Kerja sama dengan Elimination of Child Labor in Tobacco Industry (ECLTI).
Komitmen global mencanangkan untuk tidak mempekerjakan anak (*child labor*) di perusahaan industri rokok secara global. Komitmen ini diwujudkan dengan membentuk suatu foundation yang dinamakan Elimination of Child Labor in Tobacco Industry (ECLTI), termasuk di Indonesia dan sudah berjalan bertahun-tahun. Karena dipertimbangkan bertujuan mulia dan sesuai dengan program pemerintah, SMERU pun sepakat bekerja sama. Saat ini kerja sama masih berlangsung dan sedang di tahap akhir yaitu penulisan laporan.

Pembelajaran: Dari tiga kerja sama yang SMERU laksanakan bersama pihak swasta, disadari bahwa menjalin kerja sama dengan pihak swasta sangat memungkinkan dengan berbagai kebutuhan untuk mendukung bisnis sektor swasta, sepanjang sesuai dengan program pemerintah, seperti: melalui pengembangan produk CSR maupun untuk *compliance* dengan aturan yang berlaku.

PKMK – Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

PKMK berdiri tahun 1998, berada langsung di bawah Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta. Pendirian ini didasari pemikiran bahwa pusat kajian di kedokteran terlalu *critical*, sedikit sekali yang mengarah pada sektor manajemen kesehatan. Komposisi PKMK dengan pihak swasta memang tidak terlalu besar yaitu 15%. 70% dengan lembaga donor, 15% dengan pemerintah. PKMK ingin independen dan tidak bergantung pada pemerintah namun ingin menjadi “teman yang kritis” bagi pemerintah. Awalnya PKMK berbentuk lembaga penelitian, kemudian berkembang ke lembaga yang mendukung advokasi kepada pemerintah. Posisi ini tidak dapat diambil apabila PKMK terlalu dekat dengan pemerintah. Hal ini yang menyebabkan PKMK bisa menjalin dengan banyak pihak seperti swasta, tentu selama tidak bertentangan dengan visi dan misi lembaga.

PKMK melihat tidak ada yang salah dengan profit yang menjadi orientasi swasta, karena profit juga bisa disebut dengan bentuk yang lain seperti benefit. PKMK menyadari ada *framework* dan *interest* tertentu yang pihak swasta miliki dan mungkin sering tidak sejalan dengan PKMK. Kerja sama PKMK dengan swasta biasanya berlandaskan pada keinginan PKMK untuk mengembangkan

pelayanan dan kebijakan kesehatan yang lebih baik. Selama tujuannya untuk kedua hal tersebut, PKMK sangat terbuka untuk kerja sama dengan swasta.

Kerja sama yang pernah dilakukan PKMK dengan pihak swasta, yaitu:

1. Kerja sama dengan industri tambang.
MoU dilakukan dengan Fakultas Kedokteran, dengan tujuan melakukan penelitian berbasis masyarakat/komunitas, dan yang berbasis *human resource* (membantu SDM di perusahaan). Kerja sama ini sudah dilakukan sejak tahun lalu.
2. Kerja sama dengan pihak swasta yang memproduksi alat kesehatan.
Kerja sama ini didorong oleh adanya anggapan terhadap hambatan akses alat kesehatan ke masyarakat akibat adanya berbagai kebijakan (biaya alat kesehatan yang mahal). PKMK berusaha mendorong adanya produksi alat kesehatan di Indonesia, yaitu alat-alat berteknologi dan menyediakannya. Dengan harapan alat ini dapat diproduksi di dalam negeri serta terdapat tenaga (SDM) untuk memproduksinya.
3. Pelatihan manajemen pelayanan kesehatan khusus untuk pihak swasta.
4. Advokasi kebijakan tertentu, seperti misalnya membahas UU rumah sakit dll.
Kerja sama ini bersifat non-profit dengan pihak swasta yang juga non-profit. PKMK juga membuka kesempatan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat probono (tidak dibayar), murni kerja sama dengan intensi yang baik.

Pembelajaran: PKMK percaya terdapat *demand* dan *supply* di antara sektor swasta dan lembaga riset, yang penting dilakukan adalah menyamakan bahasa dari lembaga riset supaya dapat lebih dimengerti oleh sektor swasta. Kredibilitas dan integritas lembaga riset adalah hal yang sangat penting bagi sektor swasta, seperti halnya PKMK dengan nama besar UGM. PKMK optimis tidak semua pihak swasta mengkhawatirkan nilai-nilai dari sisi akademis. Menurut PKMK, banyak pihak swasta yang berpikiran bahwa penelitian bersifat akademis justru dibutuhkan terutama jika tujuannya adalah advokasi. Kesimpulannya, PKMK sangat positif untuk bisa bekerja sama dengan pihak swasta selama tujuannya untuk mengembangkan pelayanan dan kebijakan kesehatan yang lebih baik.

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat – Universitas Islam Negeri (PPIM-UIN)

PPIM, adalah lembaga riset berbasis kampus yang dikenal sebagai lembaga dakwah di bawah Kementerian Agama. Merupakan lembaga pendidikan tinggi kelanjutan dari orang-orang yang ingin belajar agama lebih tinggi secara lebih terjangkau. Pada tahun 1995 Kementerian Agama dapat hibah dari pemerintah Jepang, yang kemudian dihibahkan kepada PPIM. Banyak masalah agama yang harus diselesaikan sehingga PPIM berkontribusi terhadap aspek-aspek sosial keagamaan di Indonesia dan Asia Tenggara. PPIM bercita-cita agar dapat menjadi lembaga riset yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap platform keagamaan yang baik bagi masyarakat luas. PPIM sering diminta untuk menyelesaikan masalah di Kementerian Agama, seperti menyusun *early warning system*. Kerja sama lebih banyak dilakukan dengan Kementerian Agama baik dalam riset dan pendidikan dasar agama. 70% kerja sama PPIM dilakukan dengan kementerian dan lembaga, 30% dengan lembaga donor seperti kedutaan besar untuk meminta kami melakukan riset mengenai Islam. Saat ini PPIM memiliki kerja sama dengan Kemenlu Jepang, yang sudah berjalan empat belas tahun menjadi fasilitator untuk perusahaan/masyarakat Jepang yang ingin tahu tentang aspek kebudayaan Indonesia. PPIM mengirim sekitar 10-15 orang setiap tahun meskipun masih bersifat kerja sama non-profit.

Pembelajaran: PPIM menyadari adanya *gap* dengan pihak swasta sehingga belum pernah bekerja sama dengan swasta, khususnya pada bidang riset sosial keagamaan. PPIM menyadari, lembaga swasta memiliki tujuan/objektif tertentu yang tidak bisa PPIM penuhi.

Akatiga

Fokus dari Akatiga, banyak melakukan riset pada isu kemiskinan, tata kelola pemerintahan, agraria, ketenagakerjaan. Memiliki jaringan kerja sama riset di empat negara yaitu Cina, India, Kanada dan Indonesia tentang petani muda. Akatiga meneliti bagaimana prospek atau perjalanan kelompok-kelompok muda yang ingin menjadi petani. Akatiga juga pernah menjalin kerja sama dengan BPJS, yaitu dalam bentuk program monitoring BPJS yang disponsori oleh World Bank, yang pelaksanaan diperkirakan di tahun 2018. Akatiga juga bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama (NU) karena lembaga ini memiliki jaringan yang luas di daerah dan juga sering melakukan pelayanan masyarakat. Dari sini Akatiga memonitor bagaimana masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan BPJS. Selain itu juga melakukan pendampingan advokasi dari tingkat lokal, karena tidak semua orang dapat mengakses layanan kesehatan.

Sampai hari ini belum ada kerja sama signifikan antara Akatiga dengan sektor swasta, biasanya hanya tertahan sampai proses *bidding*. Dari sisi pengembangan lembaga, kerja sama Akatiga lebih banyak dengan pemerintah dan donor.

Pembelajaran: Akatiga melihat pemerintah, NGO, dan swasta pada intinya saling terhubung. Keinginan Akatiga untuk bekerja sama dengan swasta mulai muncul seiring komitmen dari sektor swasta juga semakin besar, misalnya dari aspek lingkungan. Akatiga sadar harus mematangkan diri sebelum bekerja sama dengan pihak swasta.

Diskusi

Dalam berkomunikasi, PRI mengakui bahwa dalam hal kerja sama penelitian dengan pihak swasta, lembaga riset bersikap tidak pro-aktif mengomunikasikan untuk menawarkan diri. Lebih banyak pihak swasta yang menemukan mereka terlebih dulu melalui website atau jaringan pertemanan. Alasan bagi lembaga riset adalah kekhawatiran tidak mampu melayani mengingat kurangnya SDM, karena faktanya dalam melayani pemerintah dan donor pun mereka sudah merasa kewalahan. Bagi pihak swasta, penyampaian informasi dari lembaga riset kepada sektor swasta sangat dibutuhkan.

Sektor swasta (korporasi, agensi kreatif, filantropi) membutuhkan *platform* khusus berupa forum yang mempertemukan sektor swasta dengan lembaga riset, karena sektor swasta memiliki *demand* yang sangat tinggi tentang riset, tetapi memang belum menemukan mitra yang cocok. Tidak hanya dari sisi *partnership* saja, tapi forum juga harus memiliki manfaat dan menguntungkan dari sektor bisnis.

Tentang publikasi hasil riset, diketahui lembaga-lembaga internasional dan donor justru senang jika informasi (hasil riset)nya dipublikasikan dan dapat dibagikan karena dapat turut 'menjual' dan mempromosikan bahwa mereka memiliki studi tertentu. Demikian pula dengan lembaga riset. Sementara bagi sektor swasta, ada perusahaan yang tidak boleh mempublikasikan hasil riset karena isu yang dihadapi adalah berhubungan dengan kompetitor. Sedangkan bagi perusahaan yang boleh mempublikasikan, perusahaan menginginkan sentuhan *Public Relations* dalam publikasinya, di mana hal ini sulit dipenuhi oleh lembaga riset. Harus ada cara penyampaian atau komunikasi dengan intisari yang lebih bagus seperti infografis yang semakin sesuai dengan perkembangan teknologi jaman sekarang. Menurut sektor swasta, tidak banyak lembaga riset yang memiliki kemampuan ini. Selain itu, sektor swasta ingin bisa *reach out* ke *stakeholdernya*, karena perusahaan swasta ingin didengar oleh pemerintah dan membentuk opini publik. Itu sebabnya mereka mencari lembaga riset yang memiliki relasi yang kuat dengan media, kemudian baru masuk ke advokasi.

Kebutuhan pengetahuan dari sektor swasta sangat beragam, seperti: *social impact measurement*, *social mapping*, *stakeholder assessment* dll. Bagi perusahaan swasta, *one stop shopping* sangat membantu, karena semakin sedikit pihak yang terlibat akan semakin bagus, mengingat informasi yang beredar juga lebih sedikit dan implementasi di lapangan akan lebih mudah. Sedangkan bagi lembaga riset, *one stop shopping* atau tidak, bukan menjadi masalah, karena lembaga riset tidak keberatan jika harus bekerja dengan lembaga riset lainnya. Kondisi di lembaga riset ini didasari kesadaran bahwa masing-masing lembaga riset memiliki *competitive advantage* yang berbeda-beda untuk ditawarkan.

Budget riset yang dipertimbangkan mahal oleh sektor swasta, kadang menjadi kendala kerja sama dengan lembaga riset. Meski secara substansi lembaga riset dinilai paling bagus, namun jika dari segi biaya memiliki *budget* paling mahal, maka kerap dianggap tidak *visible* menurut perusahaan. Hal ini dikembalikan kepada pihak swasta, ingin riset yang berkualitas atau tidak.

Kesimpulan

Berbicara mengenai kemitraan, para pihak harus sejajar. Hal ini suatu kesadaran yang harus disampaikan. Bukan hanya hubungan penjual dan pembeli, bukan hanya *donor-provider relationship*, tetapi keduanya sama-sama memiliki kebutuhan yang dapat saling memenuhi dan menguntungkan. Yang menjadi pekerjaan rumah bersama adalah bagaimana *memposisikan lembaga riset* agar sejajar saat bermitra dengan pihak swasta.

Dokumen ini merupakan bagian dari rangkaian Partnership Summaries yang didasarkan pada paparan oleh para mitra pada Pertemuan Forum Riset & Bisnis pada bulan November 2017 yang diadakan oleh CCPHI, suatu proyek yang didanai oleh Knowledge Sector Initiative. Ditulis oleh Anita Kastubi (CCPHI – Communication Officer); email: anita.kastubi@ccphi.org; atau kunjungi kami di www.ccphi.org.